

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar

Oleh: Ashar Sinilele

Pembuktian di Peradilan Agama

Oleh : Muh. Jamal Jamil

Tantangan Undang-undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas

Oleh: Pratjaja Winrekso

Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia

Oleh: Ajub Ishak

Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi

Oleh : Musyfikah Ilyas

Tinjauan Kriminologi Terjadinya Penangkapan Ikan secara Ilegal di Wilayah Perairan Teluk Bone

Oleh: Nurmiati Muhiddin

Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Kayu (Illegal Logging) di Wilayah Kabupaten Luwu

Oleh: Andi Takdir Djufri

Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Instalasi Listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar

Oleh: Adriana Mustafa

Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas terhadap Notaris Pemegang Saham

Oleh: Muhammad Anis

Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami

Oleh : Sippah Chotban

Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih

Oleh: Nur Aisyah

**Jurusan / Prodi Hukum Acara Peradilan dan Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

JURNAL
AL-QADĀU
PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 4

Nomor 1

Makassar,
Juni 2017

ISSN
2407-8115

JURNAL AL-QADĀ'U

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM
Volume 4 Nomor 1 Juni 2017

DAFTAR ISI

Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar Ashar Sinilele	1-24
Pembuktian di Peradilan Agama Muh. Jamal Jamil	25-39
Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas Pratjaja Winrekso	39-56
Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia Ajub Ishak	57-70
Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Musyifikah Ilyas	71-94
Tinjauan Kriminologi Terjadinya Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Perairan Teluk Bone Nurmiati Muhiddin	95-106
Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Kayu (Illegal Logging) di Wilayah Kabupaten Luwu Andi Takdir Djufri	107-124
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar Adriana Mustafa	125-150
Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas terhadap Notaris Pemegang Saham Muhammad Anis	151-172
Nilai Keadilan dalam Syariat-Poligami Sippah Chotban	173-184
Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih Nur Aisyah	185-196

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar

Judicial Review of the Land Acquisition Implementation towards The Development For Public Interest In Makassar

Ashar Sinilele
Dosen Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Email: asharsin769@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Diterima 16 Februari 2017	<i>Tanah merupakan tempat berpijak, bercocok tanam, perumahan, irigasi, sekolah, jalan umum, perkantoran dan tempat tumpuan bagi manusia. Diera sekarang, keterbatasan lahan tanah akibat pembangunan semakin pesat. Banyaknya bangunan yang dibangun di atas tanah konflik sehingga dibutuhkan suatu peraturan yang mendasar terhadap pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang akan melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi setiap individu dan badan untuk dapat memiliki dan menguasai sebidang tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Makassar pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah atas pemerintah daerah melalui panitia pengadaan tanah yang bertugas untuk menginvestigasi atas tanah bangunan serta tanah dan benda-benda lain serta pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah dilakukan secara musyawarah.</i> <i>Kata Kunci : Pengadaan, Tanah</i>
Revisi I 13 Maret 2017	
Revisi II 10 April 2017	
Disetujui 22 Mei 2017	<i>The land is a beachhead, farming, housing, irrigation, schools, public roads, offices and the essential part for the human. In this era, that lack of land due to the development is increasing rapidly. Many buildings built on land conflict need a legal standing to implement land acquisition program for public purposes development and it will protect and give legal certainty to individuals and entities to own and control the land plot. Implementation of the land acquisition for the construction of public interest in the city of Makassar is basically done by the government down to local government through the land procurement committee to investigate the above-ground buildings and land and other objects, as well as the provision of compensation to the holders of land rights that is held by consensus.</i> <i>Keywords : Land, Acquisition</i>